



Kementerian PPN/
Bappenas



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**bangga
melayani
bangsa**

Memperkuat Ketahanan Nasional Melalui Penciptaan Lapangan Kerja Berkelanjutan

Maliki
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat,
Kependudukan, dan Ketenagakerjaan
Kementerian PPN/Bappenas

Disampaikan pada acara
Indonesia's Green Jobs Conference 2025
Jakarta, 30 April 2025



Transformasi Ekonomi Menuju Visi Indonesia Emas 2045

Proyeksi GNI per Capita Indonesia (USD)



Sumber: UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045

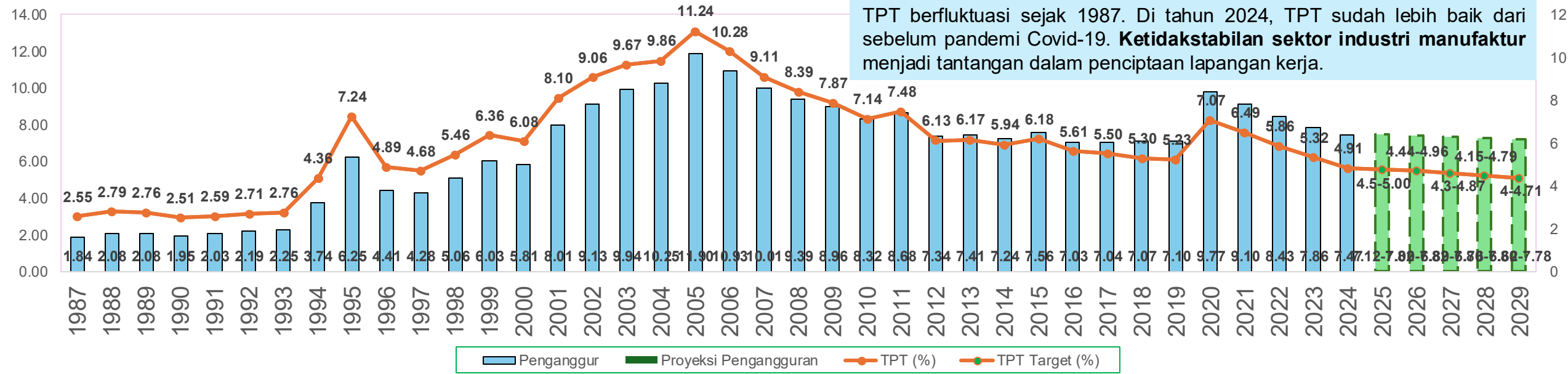
Indonesia pada tahun **2045**
... dengan pertumbuhan rata-rata 7%...

	PDB Nominal: USD 9,8 T		PDB: 5 Besar Dunia
	GNI per Kapita: USD 23.000-30.300		Middle Income Class: 80%
	Rata-Rata Pertumbuhan Investasi: 5,4 - 6,1%		ICOR: 4,6 Pada tahun 2045
	Industri Manufaktur: <ul style="list-style-type: none"> - Kontribusi PDB : 28% - Kontribusi tenaga kerja : 25,2% 		

Tahapan Transformasi Ekonomi

Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4
2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Penguatan Transformasi	Akselerasi Transformasi	Ekspansi Global	Perwujudan Indonesia Emas
Hilirisasi Sumber Daya Alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi	<i>Economic Power House</i> yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik, serta ekspor yang kokoh	Negara Berpendapatan Tinggi
Kisaran Pertumbuhan: 5,6-6,1 persen	Kisaran Pertumbuhan: 6,9-7,8 persen	Kisaran Pertumbuhan: 6,4-7,6 persen	Kisaran Pertumbuhan: 5,4-6,7 persen
Peranan Industri Pengolahan terhadap PDB: 21,9%	Peranan Industri Pengolahan terhadap PDB: 26,6%	Peranan Industri Pengolahan terhadap PDB: 30,0%	Peranan Industri Pengolahan terhadap PDB: 28,0%
Pendapatan Kelas Menengah: 38% dari populasi	Pendapatan Kelas Menengah: 50% dari populasi	Pendapatan Kelas Menengah: 61% dari populasi	Pendapatan Kelas Menengah: 80% dari populasi

Isu dan Tantangan Ketenagakerjaan



TPT berfluktuasi sejak 1987. Di tahun 2024, TPT sudah lebih baik dari sebelum pandemi Covid-19. **Ketidakstabilan sektor industri manufaktur** menjadi tantangan dalam penciptaan lapangan kerja.

- ✓ TPT terus mengalami penurunan. Pekerjaan yang tercipta masih didominasi oleh pekerjaan informal.
- ✓ Tingkat produktivitas masih tergolong rendah.
- ✓ Produktivitas tenaga kerja Indonesia sebesar 19% dibandingkan tingkat produktivitas tenaga kerja di Amerika Serikat (APO, 2024), serta berada di bawah rata-rata kawasan ASEAN (20%).

- Ketidaksesuaian keahlian (*skill-mismatch*) di pasar kerja, Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK) belum kredibel, terbatasnya akses pendidikan dan pelatihan vokasi.
- Selain itu, kita dihadapkan pada urgensi penyiapan sumber daya manusia dalam menyongsong era pekerjaan baru yang ramah lingkungan (*green jobs*).
- Tata Kelola pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri termasuk PMI yang belum terintegrasi.



Penciptaan Lapangan Kerja

- Penciptaan lapangan pekerjaan di sektor bernilai tambah tinggi, bersifat padat karya, dan produktif.
- Pengembangan lapangan kerja hijau dan berbasis teknologi.
- Pengembangan peluang kewirausahaan.
- Perluasan kesempatan tenaga kerja Indonesia berketerampilan menengah-tinggi di pasar kerja global.

Pengembangan Keahlian

- Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi secara konsisten.
- *Reskilling* dan *upskilling* untuk memenuhi dinamika pekerjaan baru (teknologi, pekerjaan hijau).
- Pemagangan dan peningkatan kompetensi pegawai sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam.

Penguatan Ekosistem Ketenagakerjaan

- Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK), termasuk data ketenagakerjaan, yang kredibel
- Penciptaan iklim ketenagakerjaan yang mendukung pasar kerja fleksibel, responsif gender, inklusif dan memfasilitasi dinamika perubahan pola bekerja.
- Penguatan sistem perlindungan sosial adaptif bagi pekerja, termasuk bagi pekerja migran Indonesia

Ekonomi Hijau: Penerapan Agenda Pembangunan Transformasi Ekonomi

Prioritas Nasional 2 RPJMN 2025-2029:

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru



Ekonomi Hijau sebagai bagian dari Transformasi Ekonomi



Ekonomi Rendah Karbon



Ekonomi Biru (*Blue Economy*)



Transisi Energi



Pemulihan Lahan Berkelanjutan



Pengelolaan Limbah & Ekonomi Sirkular



Pengembangan Industri Hijau



Pesisir & Laut Rendah Karbon



Pengembangan Energi Berkelanjutan

Transisi dari *business as usual* menuju pembangunan yang mengutamakan keseimbangan ekonomi, sosial dan lingkungan

Pengembangan Pekerjaan Hijau/*Green Jobs*

Business as Usual Approach

RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025)

Sasaran /Prioritas Nasional

Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau

Arah Kebijakan/Program Prioritas

Pekerjaan hijau/ *green jobs*

Intervensi Kebijakan/Kegiatan Prioritas

1. Pengembangan Ekosistem Pekerjaan Hijau
2. Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Hijau

Indikator/ Target

Proporsi Tenaga Kerja Hijau → 2,96%-3,14 % (2029)

Proyeksi Tenaga Kerja Hijau

2025 → 4,01 Juta - 4,06 Juta (2,70%-3,73%)

2029 → 5,01 Juta – 5,43 Juta (2,96%-3,14%)

IMPLIKASI KEBIJAKAN



- Percepatan penyusunan dan penyesuaian standar kompetensi untuk profesi hijau.
- Penyesuaian kurikulum dan penguatan kapasitas lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan teknis.
- Pemerataan akses pelatihan di wilayah potensial.
- Perluasan skema sertifikasi dan penguatan sistem informasi ketenagakerjaan hijau.
- Adopsi standar kompetensi internasional dan perluasan akses pelatihan.
- Penguatan mekanisme pengakuan keterampilan informal.
- Penguatan kolaborasi multipihak.
- Integrasi perencanaan pengembangan SDM hijau.

Rencana Aksi Peta Jalan Pengembangan Tenaga Kerja Hijau Indonesia



Rencana Aksi

Tahap I

(2025-2029)

Penguatan
Fondasi dan
Pelaksanaan
Program

Tahap II

(2030-2034)

Akselerasi
Skala Nasional
dan Perluasan
Sektoral

Tahap III

(2035-2039)

Ekspansi ke
Tingkat
Regional
dan Global

Tahap IV

(2040-2045)

Keberlanjutan
dan Konsolidasi
Sistem

Kementerian/Lembaga yang terlibat



KEMENKO PMK
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA



**Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi**



**KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**



**Kementerian
Lingkungan Hidup/
Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup
Republik Indonesia**





Ministry of National
Development Planning/Bappenas
Republic of Indonesia



TERIMA KASIH

